

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Pada tahun 2020, wabah pandemi Covid-19 menantang respons dan kesiapsiagaan seluruh pihak untuk menangkal dampak yang ditimbulkan akibat pandemi di berbagai sektor. Sebagai salah satu kota yang terganggu akibat pandemi Covid-19, Kota Padang ikut mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk bergotong royong menghadapi pandemi Covid-19 seefektif dan seefisien mungkin demi keselamatan bersama. Di sektor ekonomi, persoalan nyata dapat dilihat dari potensi naiknya jumlah masyarakat rentan miskin yang diakibatkan oleh kondisi pandemi. Status Kota Padang sebagai wilayah dengan kasus positif dan penyebaran virus Covid-19 tertinggi di Sumatra Barat mengharuskan pemerintah Kota Padang, swasta, dan masyarakat dapat memadukan perbedaan yang ada dalam prioritas program sebagai wujud tujuan bersama menangani kemiskinan di masa pandemi Covid-19.

Fenomena penanganan kemiskinan Kota Padang di masa pandemi tahun 2020 yang peneliti lihat melalui kaca mata teori model *collaborative governance* oleh Ansell dan Gash menunjukkan proses kolaborasi antar aktor yang telah berjalan dengan cukup baik. Berangkat dari asumsi yang peneliti bangun sebelumnya, peneliti menelaah fenomena tersebut melalui empat tahap, diantaranya kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, serta proses kolaborasi. Di setiap tahap tersebut pemerintah, swasta, dan masyarakat bergerak sebagai aktor yang memberikan kontribusi yang dapat membantu masyarakat

miskin dari himpitan ekonomi di masa pandemi. Para *stakeholder* tersebut menyatukan peran dan saling mengisi kekurangan dalam lingkup kolaborasi. Meskipun demikian, dalam realitanya ditemukan berbagai kelebihan dan kekurangan dalam kolaborasi sehingga memunculkan ketimpangan peran dalam proses kolaborasinya.

Kondisi awal kolaborasi penanganan kemiskinan di Kota Padang tahun 2020 memperlihatkan adanya keberadaan tenaga dengan komitmen dan upaya realisasi tujuan penanganan kemiskinan melalui aliran dana, pakar, hingga terlibatnya elemen masyarakat. Di sisi lain, kolaborasi ini tidak menonjolkan insentif dalam bentuk uang namun lebih kepada capaian kinerja dan branding atau prestise. Kemudian, adapun desain kelembagaan yang ada dalam kolaborasi ini menunjukkan peran swasta dan masyarakat yang harus lebih ditingkatkan agar tujuan kolaborasi dapat lebih maksimal. Peraturan Wali Kota Nomor 24A Tahun 2020 sebagai aturan dasar kolaborasi dijalankan secara terbuka, bahkan memiliki pengawasan berlapis yang melibatkan BPK, inspektorat, kepolisian, hingga kejaksaan.

Selanjutnya, hasil tinjauan peneliti terkait kepemimpinan dalam kolaborasi ini dapat terlihat dari posisi Pemerintah Kota Padang sebagai leading sektor kolaborasi, dimana Sekretaris Daerah menjadi pemimpin penanggulangan kemiskinan yang terlihat pada posisinya sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di masa pandemi Covid-19 tahun 2020. Gerak para pemimpin juga dijumpai dalam musyawarah pimpinan daerah (muspida) yang dipimpin oleh Wali Kota Padang yang turut memfasilitasi dialog untuk swasta dan

masyarakat untuk menguatkan kolaborasi. Di samping itu, proses kolaborasi dalam menangani kemiskinan Kota Padang tahun 2020 ditunjukkan dengan terlaksananya dialog tatap muka antar aktor melalui rapat koordinasi, FGD, dan pemberian penghargaan kepada pihak yang berkontribusi. Proses ini juga memperlihatkan adanya kepercayaan yang terbangun antara pihak yang memberikan bantuan dengan pihak yang memproses dan membagikan bantuan dengan alur tertentu yang berangkat dari komitmen bersama menuntaskan kemiskinan di masa pandemi. Proses kolaborasi yang bermuara pada hasil sementara dapat dijumpai melalui capaian penurunan angka kemiskinan serta capaian Kota Padang yang mewakili Sumatra Barat dengan inovasi "pangku bimbiang" dengan keterlibatan pihak secara *pentahelix* untuk memajukan usaha mikro.

Maka dari itu, dari empat tahapan model *collaborative governance* yang dikemukakan Ansell dan Gash, maka dapat disimpulkan dalam kolaborasi ini pemerintah memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan dengan swasta dan masyarakat. Hal ini disebabkan pemerintah lebih mempunyai sumber daya, sumber dana, dan program atau kegiatan sehingga memang harus menjalankan semua itu. Sementara itu, kontribusi pihak swasta bergantung pada dana CSR yang mereka miliki begitupun dengan masyarakat yang bergantung pada pendanaan masing-masing organisasi maupun peran yang dapat membantu pemerintah. Hal tersebut juga didukung oleh *refocusing* anggaran yang memang juga diarahkan untuk membantu masyarakat miskin.

Secara garis besar, peneliti menyimpulkan bahwa tahap kondisi awal, membangun komitmen dan kepercayaan, serta hasil sementara memang lebih

terlihat daripada tahap lainnya. Pemerintah telah menjalankan perannya dengan cukup baik, namun keterlibatan swasta dan masyarakat perlu lebih maksimal lagi agar kolaborasi penanganan kemiskinan dapat lebih baik. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan peran dalam kolaborasi, sebab seluruh aktor dapat beriringan memandu keahlian masyarakat dalam pemberdayaan dengan potensi keberlanjutan yang lebih menjanjikan dalam penguatan ekonomi masyarakat miskin.

6.2. Saran

Berdasarkan analisis data, hasil, dan kesimpulan yang telah peneliti paparkan sebelumnya, terdapat beberapa saran teoritis dan saran praktis yang peneliti berikan, diantaranya:

6.2.1. Saran Teoritis

Melalui penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran teoritis berdasarkan analisis data pada penelitian yang telah dipaparkan diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini memiliki fokus kajian berupa sinergitas antara aktor pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penanggulangan dampak Covid-19 terhadap masyarakat miskin di Kota Padang tahun 2020 dilihat berdasarkan model *collaborative governance* Ansell dan Gash yang terdiri atas kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, serta proses kolaborasi. Maka dari itu, untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan adanya kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana masing-masing jenis bantuan kepada masyarakat miskin dapat disalurkan melalui

kapabilitas *dynamic governance*. Dalam hal ini, peneliti menemukan penelitian kapabilitas *dynamic governance* dalam pengelolaan BLT telah dilakukan oleh salah satu mahasiswa Ilmu Politik, yakni Muhammad Ichsan. Maka dari itu, upaya penanganan masyarakat miskin melalui penyaluran bantuan di masa pandemi dapat dikaji berdasarkan jenis bantuan lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

2. Berdasarkan analisis yang telah peneliti jabarkan, ditemukan bahwa penanggulangan dampak Covid-19 terhadap masyarakat miskin di Kota Padang tahun 2020 mengalami ketimpangan peran dalam pelaksanaan kolaborasinya. Untuk itu saran peneliti pada penelitian selanjutnya ialah agar dapat lebih mendalami faktor-faktor yang membuat minimnya peran aktor swasta dan masyarakat yang seharusnya dapat lebih dioptimalkan berdasarkan perspektif teori lainnya.

6.2.2. Saran Praktis

Adapun beberapa saran praktis yang dapat peneliti berikan berdasarkan analisis data pada penelitian yang telah dipaparkan diantaranya sebagai berikut:

1. Proses kolaborasi yang maksimal akan tercipta apabila pemerintah sebagai *leading sector* penanganan kemiskinan dapat lebih merangkul aktor swasta dan masyarakat melalui inovasi program

dengan keterlibatan yang lebih besar dari masing-masing pihak kedepannya.

2. Keterlibatan berbagai SKPD yang menampung dan mendistribusikan bantuan kepada masyarakat miskin hendaknya melakukan *cross check* data agar sasaran bantuan benar-benar merupakan masyarakat yang layak menerima bantuan.
3. Capaian hasil kolaborasi perlu ditinjau dengan sebaik-baiknya dan harus sesuai dengan kondisi di lapangan agar dapat menjadi evaluasi di masa yang akan datang untuk penanganan kemiskinan yang lebih baik lagi di masa sulit ataupun di masa normal.

